



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2025 – 2029



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kekuatan, dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Badan Kesbangpol) Tahun 2025–2029 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini bukan sekadar rencana kerja, melainkan peta jalan strategis yang menjadi kompas bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol untuk melangkah dengan visi yang jelas dan strategi yang terukur.

Jakarta adalah miniatur Indonesia. Meski sudah tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta masih menjadi jantung perekonomian, pusat seni dan budaya serta barometer politik di Indonesia. Identitas kota Jakarta tidak hanya dimiliki oleh satu jenis suku atau dominasi agama tertentu, tetapi juga milik seluruh masyarakat Jakarta yang berbeda latar belakang. Dalam lanskap sosial yang dinamis ini, peran Badan Kesbangpol menjadi krusial dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di daerah, mengelola potensi konflik secara preventif, menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pemahaman politik yang sehat. Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol menemui berbagai tantangan baik dari sisi internal organisasi maupun sisi eksternal dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan perubahan kondisi dunia yang cepat.

Renstra ini disusun dengan memadukan analisis ilmiah, kebijakan nasional, dan aspirasi masyarakat. Seluruh program dan kebijakan yang termuat di dalamnya dirancang agar selaras dengan kebijakan yang telah diamanatkan oleh RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Pendekatan yang digunakan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, partisipasi publik, dan transparansi sebagai wujud akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kami berterima kasih kepada semua pihak dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat, partai politik, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi dan masukan berharga dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi acuan yang kuat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat integrasi sosial, dan membangun ketahanan bangsa utamanya di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 24 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta



Muhamad Matsani

NIP. 197110201996031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 Latar Belakang 1

 I.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

 I.3 Maksud dan Tujuan 4

 I.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... 7

 II.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7

 A. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7

 B. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14

 C. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 19

 D. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 21

 II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22

 A. Identifikasi Permasalahan 22

 B. Rumusan Isu Strategis 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38

 III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
 2025-2029 38

 III.2 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 39

 III.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
 2025-2029 40

 III.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 50

 IV.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Tahun 2025-2029 50

 IV.2 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah 73

 IV.3 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Badan Kesatuan
 Bangsa dan Politik..... 73

 IV.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik..... 76

BAB V PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Distribusi Pegawai Badan Kesbangpol menurut Golongan Ruang ASN	16
Tabel II. 2	Aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
Tabel II. 3	Pembandingan Pagu dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
Tabel II. 4	Realisasi Indikator Pembangunan Jangka Menengah Jakarta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024.....	19
Tabel II. 5	Keterlibatan Aktor dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum...	21
Tabel II. 6	Tujuan dan Indikator Tujuan Urusan Pemerintahan Umum	32
Tabel II. 7	Isu Strategis Badan Kesbangpol	35
Tabel III. 1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol.	39
Tabel III. 2	Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.....	40
Tabel III. 3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41
Tabel III. 4	Merumuskan Tujuan Renstra Badan Kesbangpol berdasarkan Isu Strategis.....	44
Tabel III. 5	Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra	45
Tabel III. 6	Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra	47
Tabel IV. 1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029.....	50
Tabel IV. 2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	60
Tabel IV. 3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73
Tabel IV. 4	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77
Tabel IV. 5	Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9

Gambar II. 2 Sasaran Visi berkaitan Fungsi Pemerintahan Umum..... 34

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1 Pegawai menurut Kelompok Usia 15

Grafik II. 2 Pegawai Menurut Pendidikan 17

Grafik II. 3 Jumlah Konflik Sosial di Jakarta 28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, secara teknis terkait perencanaan pembangunan khususnya pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sedangkan secara internal pedoman penyusunan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan yang berlaku secara periodik, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Badan Kesbangpol) menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan daerah DKI Jakarta serta memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Badan Kesbangpol juga disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2029. Adapun acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kesbangpol antara lain terfokus kepada tugas dan fungsi utama yaitu pelaksanaan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penegakan ketenteraman dan ketertiban umum yang diwujudkan dengan salah satunya pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang secara rinci dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Kesbangpol memiliki tantangan tersendiri khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 151 Tahun 2024, yang mana ketika Keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu kota Negara diterbitkan, Jakarta akan beralih fungsi menjadi daerah khusus yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam upaya menjamin pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang ada di DKI Jakarta. Peran tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan aktivitas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diharapkan dapat terlaksana secara tepat dan optimal. Lebih lanjut, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merinci urusan Pemerintahan Umum yang terdiri atas tujuh sub urusan, yaitu:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selaras dengan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, kualitas pelayanan publik, dan daya saing, serta menjawab tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi, yang prosesnya saling berkaitan.

Proses penyusunan dan sistematika Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai tahapan sebagaimana pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Perumusan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra dan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
4. Verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah
5. Perumusan rankhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 dan reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap rankhir Renstra Tahun 2025-2029
6. Verifikasi rancangan akhir Renstra perangkat daerah
7. Penetapan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rencana strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2049;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua puluh) Besar Kota Global Dunia.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
3. Sebagai dasar menentukan indikator kunci keberhasilan Badan Kesbangpol dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, sebagai berikut:

1. Acuan dan/atau pedoman kerja internal Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol setiap tahunnya;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesbangpol;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antar perangkat daerah, antara perangkat daerah dengan instansi pemerintah lainnya, dan antara pemerintah daerah dengan aktor non-pemerintah; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029.

I.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian pertama **Pendahuluan**, yang secara rinci berisi:
 - a. Latar Belakang, menjabarkan rumusan latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Badan Kesbangpol.
 - b. Dasar Hukum Penyusunan, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
 - c. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan singkat maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - d. Sistematika Penulisan, menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029.
2. Bagian kedua **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**, yang secara rinci berisi:
 - a. Gambaran pelayanan perangkat daerah, menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data lainnya yang relevan sesuai kebutuhan.
 - b. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Badan Kesbangpol, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Badan Kesbangpol, dan hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol. Selain itu, terdapat rumusan isu strategis daerah yang disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat memengaruhi Badan Kesbangpol baik secara langsung maupun langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Bagian ketiga **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**, secara rinci berisi Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol DKI Tahun 2025-2029.

4. Bagian keempat **Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, yang berisi uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol DKI Jakarta Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
5. Bagian kelima **Penutup**, memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam menyusun kebijakan strategis Tahun 2025-2029, diperlukan gambaran kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Badan Kesbangpol) termasuk upaya dan tantangan yang telah dihadapi pada periode sebelumnya. Gambaran pelayanan Badan Kesbangpol selama periode Tahun 2020-2024 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya, dan capaian-capaian penting lainnya yang dapat dijadikan panduan dan bahan pertimbangan teknokratik dalam menyusun program kerja lima tahun ke depan.

II.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 5) Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 6) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 7) Pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi.
- 8) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

- 10) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya.
- 11) Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya.
- 12) Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- 13) Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 14) Pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 15) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 16) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Rincian fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol
- 2) Membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara.
- 3) Melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanggulangan konflik sosial.
- 4) Melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik.

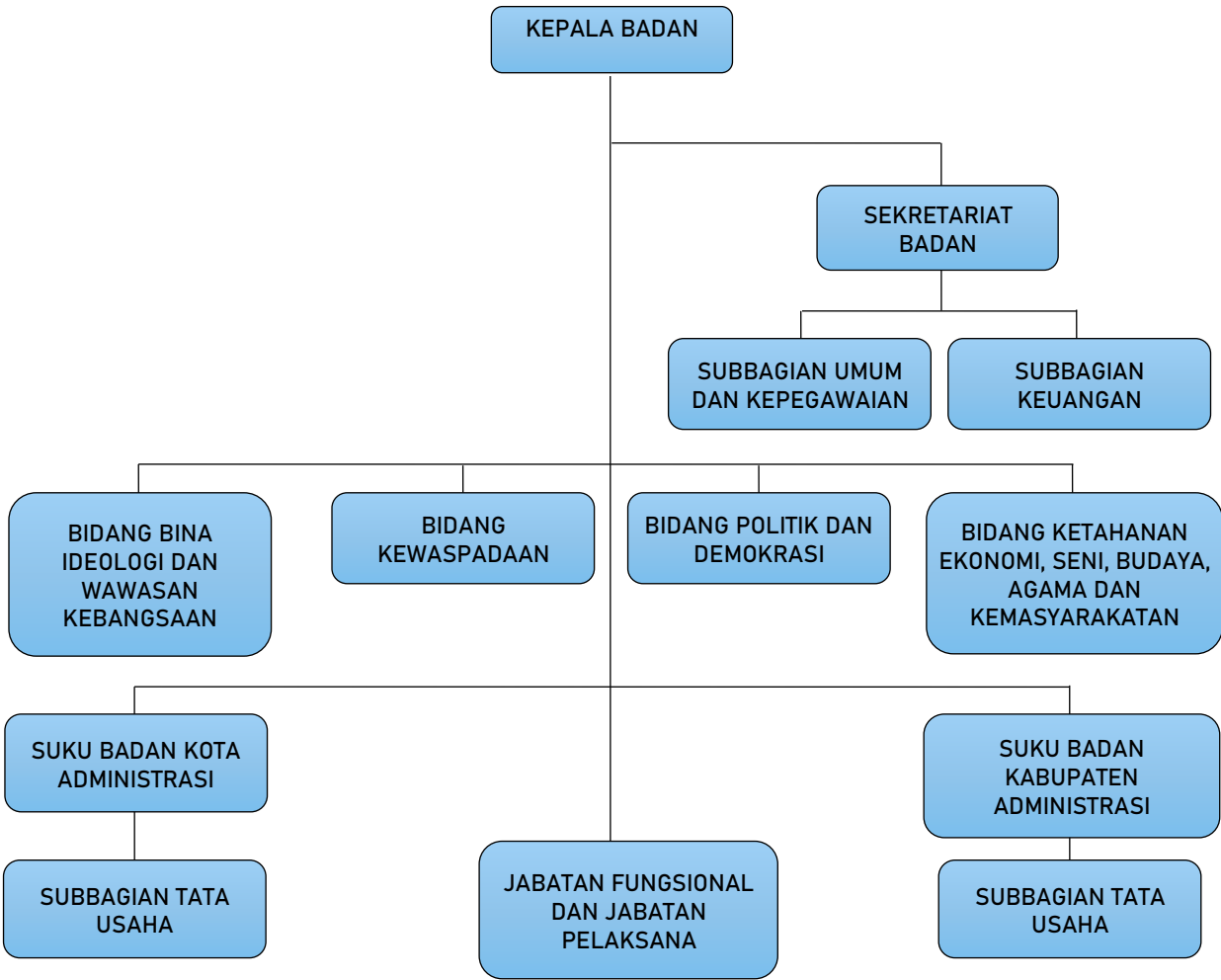
Berdasarkan fungsi dan pengelompokan fungsi di atas, dengan menganut *structure follows function*, dibentuk struktur organisasi Badan Kesbangpol. Mengacu pada lampiran XXXVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas unsur kepala badan, sekretariat badan, empat bidang, suku badan (6 suku badan kota administrasi, dan 1 suku badan kabupaten administrasi), dan kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 4) Bidang Kewaspadaan.
- 5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

- 6) Bidang Politik dan Demokrasi.
- 7) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 8) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 9) Jabatan Fungsional.
- 10) Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah struktur organisasi Badan Kesbangpol:

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Uraian tugas dan tata kerja Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut.

- 1) Kepala Badan
Kepala Badan Kesbangpol melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan bertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepala Badan Kesbangpol berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta

secara koordinatif berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Kesbangpol. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Badan Kesbangpol;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesbangpol;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol;
- d. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Kesbangpol;
- e. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Kesbangpol;
- f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol; dan
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

3) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
- c. pelaksanaan kajian dan evaluasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

- d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- e. peningkatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

4) Bidang Kewaspadaan

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi strategik mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- c. pelaksanaan kajian dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- d. pemantauan kerawanan sosial terkait ideologi, politik, sosial dan budaya;
- e. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Bidang Kewaspadaan;
- g. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kewaspadaan;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kewaspadaan; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggaran di bidang kewaspadaan.

5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

6) Bidang Politik dan Demokrasi

Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai politik dan demokrasi;
- c. pelaksanaan kajian dan evaluasi budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
- f. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelembagaan politik dan demokrasi.

7) Suku Badan Kesatuan Bangsa Bangsa dan Politik Kota Administrasi

Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi merupakan unit kerja Badan Kesbangpol yang berada pada Kota Administrasi. Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol serta secara koordinatif dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Walikota.

Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas, Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;

- b. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
 - f. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
 - h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada PD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi; dan
 - i. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.
- 8) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi
- Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi merupakan unit kerja Badan Kesbangpol yang berada pada Kabupaten Administrasi. Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol serta secara koordinatif dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Bupati.
- Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas, Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kabupaten Administrasi;

- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Administrasi;
- f. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Administrasi;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada PD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kabupaten Administrasi; dan
- i. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi.

B. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh faktor penggerak utama berupa sumber daya, baik sumber daya manusia, aset, maupun anggaran. Adapun uraian singkat kondisi sumber daya Badan Kesbangpol sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

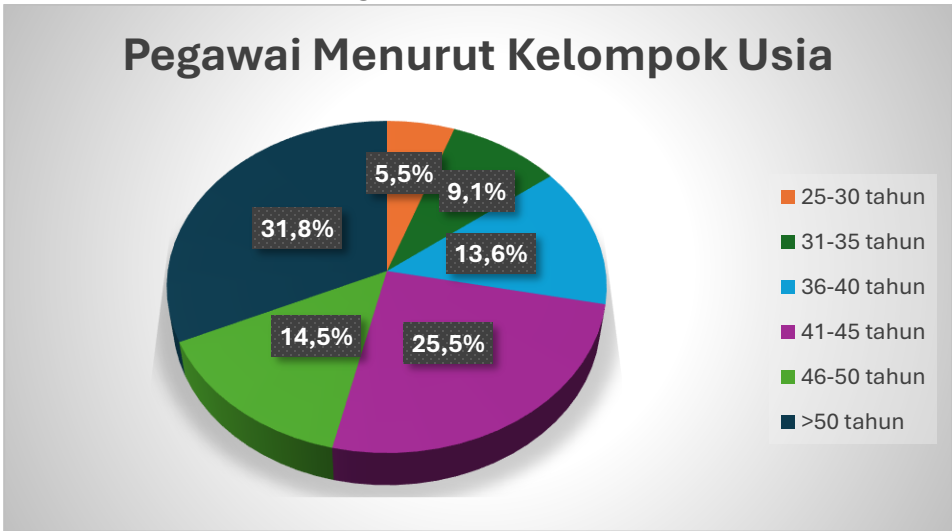
1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol seluruhnya adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 105 (seratus lima) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) orang berstatus Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang tersebar di Badan Kesbangpol Provinsi dan Suku Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota Administrasi. Secara rinci kondisi SDM pada Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi SDM menurut kelompok usia

Pegawai yang saat ini bekerja pada Badan Kesbangpol didominasi oleh kelompok rentang usia lebih dari 50 tahun sebanyak 35 orang. Rentang usia pegawai terbanyak selanjutnya secara berturut-turut adalah rentang usia 41 s.d. 45 sebanyak 28 orang, rentang usia 45 s.d. 50 tahun sebanyak 16 orang, rentang usia 36 s.d. 40 tahun sebanyak 15 orang, rentang usia 31 s.d. 35 tahun sebanyak 10 orang, dan rentang usia 25 s.d. 30 tahun sebanyak 6 orang. Sebaran tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.1 Pegawai menurut Kelompok Usia



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol, 2024.

Kondisi pegawai Badan Kesbangpol pada deskripsi dan grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 8 s.d. 10 tahun ke depan sebanyak 35 pegawai (31,8%) akan memasuki masa purna atau pensiun. Hal ini akan berdampak antara lain potensi kekosongan jabatan struktural/fungsional subkelompok dalam jumlah yang cukup signifikan. Sementara itu, proses untuk mengisi kekosongan tersebut membutuhkan administrasi yang tidak sebentar. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tenggat waktu pengisian kekosongan jabatan tersebut akan membuat Badan Kesbangpol tidak dapat melakukan pengisian pejabat definitif dengan segera, yang dapat berdampak pada terganggunya kinerja organisasi Badan Kesbangpol secara keseluruhan. Terkial hal ini Badan Kesbangpol perlu untuk berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait untuk mengatasi serta memitigasi hal tersebut.

Jumlah pegawai rentang usia 40 s.d. 50 tahun dengan total sejumlah 79 orang (71,82%) dapat menjadi kekuatan Badan Kesbangpol apabila dilihat dari sisi pengalaman dan jejaring, namun sekaligus dapat pula menjadi tantangan dari sisi keterciptaan inovasi dan penguasaan teknologi baru. Di sisi lain, proporsi pegawai usia muda (25 s.d. 40 tahun) hanya sekitar 19,09% dari total pegawai (21 orang), relatif kecil dibandingkan dengan pegawai yang akan memasuki masa purna. Dengan kata lain, berdasarkan proporsi pegawai pada distribusi usia, Badan Kesbangpol telah mengalami kesenjangan generasi (*generation gap*) sumber daya manusia yang cukup mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

b. Distribusi SDM menurut golongan ruang ASN

Kondisi SDM aparatur menurut golongan ruang menjadi penting dalam rangka menyusun rencana pengembangan karir pegawai. Pada Badan Kesbangpol,

jumlah pegawai terbanyak berada pada golongan III yaitu sebanyak 77 orang (70%), sedangkan golongan dengan jumlah pegawai paling sedikit pada Golongan IX (PPPK) sebanyak 5 orang (4,5%).

Berikut tabel distribusi pegawai menurut golongan ASN.

Tabel II.1 Distribusi Pegawai Badan Kesbangpol menurut Golongan Ruang ASN

Golongan	Jumlah	Persentase
Gol IV	14	12,73%
Gol III	77	70,00%
Gol II	14	12,73%
Gol IX	5	4,55%

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol, 2024.

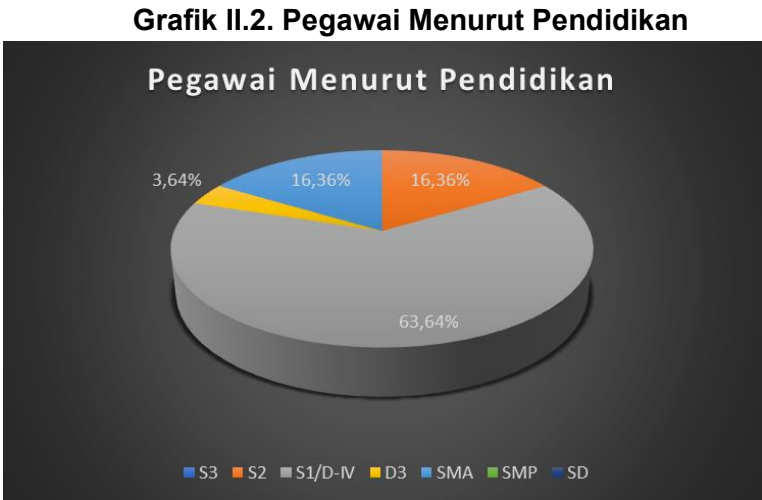
Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pegawai berada pada golongan II dan III/level pelaksana dan fungsional. Ini menunjukkan basis tenaga teknis yang cukup kuat, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial. Di sisi lain jumlah komposisi golongan IV/pejabat struktural atau fungsional senior yang memegang peran strategis. jumlahnya tidak begitu banyak. Hal ini memberikan tantangan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang dinamis dan kompleks. Dengan kata lain, kapasitas perencanaan dan pengambilan keputusan berisiko menjadi tidak seimbang.

Selanjutnya, golongan II (*entry level*) saat ini proporsinya masih cukup, namun dalam 5 tahun ke depan akan banyak pegawai dari Golongan II yang akan naik ke golongan III. Demikian juga pegawai dengan golongan III akan berada pada level tertinggi (III/d) dalam 5 Tahun mendatang. Jika rekrutmen pegawai baru masih minim, hal ini akan berdampak pada kekosongan pegawai di level pelaksana dasar. Demikian juga dengan asumsi kenaikan pangkat reguler (4 tahun), pegawai golongan III yang memenuhi syarat akan naik ke golongan IV. Hal ini akan menambah jumlah ASN senior. Apabila minim atau tidak ada rekrutmen pegawai baru, hal ini akan berdampak pada *overload managerial* tanpa adanya staf pelaksana. Rekrutmen baru sangat diperlukan, terutama untuk mengisi Golongan II dan III sebagai basis staf pelaksana.

c. Distribusi ASN menurut tingkat pendidikan

Distribusi pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1/Diploma IV sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau setara 63,64%. Berikutnya, pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 18 (delapan

belas) orang, SMA/Sederajat juga sebanyak 18 (delapan belas) orang, sedangkan D3/Sederajat sebanyak 4 (empat) orang.



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol, 2024.

Tingkat pendidikan Strata 1 yang tersedia dan terbanyak saat ini didominasi oleh latar pendidikan jurusan Ilmu Pemerintahan sebanyak 12 orang, Ilmu Hukum 8 orang, Ilmu Administrasi Publik 7 orang, Ilmu Administrasi Negara 4 orang, Ilmu Hubungan Internasional 4 orang, dan Ilmu Komunikasi 3 orang. Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, Badan Kesbangpol perlu melihat kembali kesesuaian kondisi eksisting pendidikan pegawai dengan jabatan yang diampu. Latar belakang pendidikan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol berkaitan dengan permasalahan sosial politik yang bersifat dinamis sehingga diharapkan pegawai memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa dan merumuskan kebijakan yang tepat. Selain itu, kompetensi dalam hal komunikasi massa dan komunikasi politik juga dinilai sangat penting mengingat salah satu fungsi Badan Kesbangpol yaitu memberikan fasilitasi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai tidak hanya disesuaikan dengan latar pendidikan tetapi juga diikuti dengan peningkatan kompetensi dalam hal penguasaan Bahasa Asing untuk mendukung visi Jakarta sebagai Kota Global.

2) Sumber Daya Aset

Sebagai salah satu unsur manajemen dalam rangka akselerasi pencapaian target organisasi, kondisi aset menjadi penting. Berikut rincian Aset Badan Kesbangpol yang terkait dengan pelaksanaan manajemen dan pencapaian target organisasi Badan Kesbangpol:

Tabel II.2 Aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah dan Bangunan A	1 unit (500 M ²)			
2.	Tanah dan Bangunan B	1 unit (462 M ²)			
3.	Komputer	72 buah	40	26	6
4.	Laptop/Notebook	68 buah	32	17	19
5.	Proyektor	10 buah	2	5	3
6.	Printer	63 buah	33	16	14
7.	Pick Up	2 buah	1	1	-
8.	Mini Bus dan Sedan	11 buah	9	1	1
9.	Kendaraan Roda 2	5 buah	5	-	-
10.	TV dan Monitor	3 buah	3	-	-
11.	Handycam dan Kamera	12 buah	3	8	1
12.	Mesin Presensi	7 buah	6	-	1
13.	Mesin Ketik	4 buah	3	-	1
14.	Mesin Penghancur Kertas	6 buah	2	2	2

Sumber: Kartu Inventaris Barang Badan Kesbangpol dan Suku Badan Kesbangpol, 2024, diolah Agustus 2025.

Berdasarkan inventarisasi, beberapa jenis aset/perangkat kerja untuk pelaksanaan utama tugas dan fungsi Badan Kesbangpol berada dalam jumlah serta kondisi yang beragam. Misalnya aset berupa komputer dan laptop, berjumlah 140 unit, namun yang kondisinya baik hanya sejumlah 72 unit, sedangkan selebihnya berkategori rusak ringan sampai rusak berat sehingga tidak dapat digunakan dengan optimal. Dengan kondisi demikian, apabila dibandingkan saja dengan jumlah pegawai yang berjumlah 110 orang, maka jumlah komputer dan laptop jumlahnya belum mencukupi. Ketersediaan aset/perangkat kerja dengan kondisi tersebut akan menjadi perhatian Badan Kesbangpol ke depan sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Badan Kesbangpol.

3) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran turut menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Anggaran yang didapatkan oleh Badan Kesbangpol dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2024 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.3. Pembandingan Pagu dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tahun	Pagu Indikatif Renstra	APBD	% Pemenuhan	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	2020	65.930.189.185	44.780.755.470	67,92	42.019.688.415	93,83
2.	2021	74.228.117.587	106.561.189.512	143,56	105.377.249.815	98,89
3.	2022	81.305.430.539	110.191.556.109	135,53	106.422.426.344	96,58
4.	2023	192.529.390.995	1.250.517.158.350	649,52	1.244.116.309.531	99,49
5.	2024	212.238.630.423	989.454.881.713	466,20	982.061.548.321	99,25

Sumber: RPJMD, RKPD, Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Gabungan Tahun 2020 s.d. 2024, data diolah Agustus 2025.

Berdasarkan data tersebut, pagu APBD yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol pada Tahun 2020 berada di bawah pagu indikatif Renstra dikarenakan adanya

kondisi wabah COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan *refocussing* anggaran serta penguatan pada sektor penanganan COVID-19. Selanjutnya mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 pagu APBD yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol di atas pagu indikatif Renstra. Namun demikian pagu tersebut dominan berupa pemberian hibah kepada partai politik (berupa bantuan keuangan Parpol), serta kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Pemerintah Pusat/Lembaga Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Adapun dalam hal kinerja anggaran Tahun 2020 sampai dengan 2024, Badan Kesbangpol memiliki kinerja yang sangat baik dengan penyerapan anggaran di atas 90%.

C. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keberhasilan pelayanan Badan Kesbangpol periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yaitu perbandingan realisasi dengan target indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pelayanan juga dapat dilihat dari seberapa efektif dan efisien perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2020-2024. Gambaran capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4 Realisasi Indikator Pembangunan Jangka Menengah Jakarta
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Tiga indikator pada aspek kebebasan dalam Indeks Demokrasi	Nilai	N/A*	N/A **	N/A **	82,15	82,4	N/A*	92,78	84,29	95,69	87,15
2	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	Nilai	N/A*	N/A **	N/A **	67,17	67,42	100	100	100	100	100
3	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	Persen	N/A ***	N/A ***	N/A ***	4,88	5,13	N/A ***	N/A ***	N/A ***	9,75	10,81
4	Tingkat Partisipasi Pemilu	Persen	N/A ****	N/A ****	N/A ****	N/A ****	77,75	N/A ****	N/A ****	N/A ****	N/A ****	74,28

Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2025.

Keterangan:
* : tidak memiliki target / realisasi dikarenakan pada tahun 2020 masih menggunakan IDI dengan metode lama, di mana belum ada aspek kebebasan beserta 3 indikator penyusun indikator dimaksud, serta indikator tersebut tidak terdapat dalam Renstra Badan Kesbangpol 2017-2022
** : tidak memiliki target pada tahun 2021-2022 dikarenakan indikator tersebut tidak terdapat dalam Renstra Badan Kesbangpol 2017-2022
*** : tidak memiliki target / realisasi pada tahun 2020-2022 dikarenakan indikator tersebut tidak terdapat dalam Renstra Badan Kesbangpol 2017-2022
**** : tidak memiliki target / realisasi dikarenakan pada tahun tersebut tidak ada Pemilu

Berdasarkan Tabel II.4 dapat dijelaskan capaian masing-masing indikator kinerja utama Badan Kesbangpol sebagai berikut:

- 1) Nilai Tiga indikator pada aspek kebebasan dalam Indeks Demokrasi berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun ketiga indikator yang menjadi perhitungan adalah: a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Keberhasilan pencapaian target ini digapai antara lain melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang konsisten menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi yang partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, perkumpulan penghayat kepercayaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi etnis, partai politik, generasi muda (pelajar dan mahasiswa), dan *stakeholder* strategis lainnya. Selain itu Badan Kesbangpol senantiasa melakukan koordinasi serta menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan para *stakeholder* antara lain perangkat daerah lain, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (TNI/Polri/Kejaksaan/anggota Forkopimda lainnya);
- 2) Target Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi, juga dapat terpenuhi. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari 22 indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Pada tahun 2020-2023, indikator ini berhasil mendapatkan nilai sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target Indikator ini juga tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman di bidang pendidikan politik dengan melibatkan pengurus dan anggota partai politik, termasuk juga kader perempuan partai politik.
- 3) Target Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, keberhasilan pencapaian target Indikator ini tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman di bidang kewaspadaan dini, pencegahan, serta penanganan konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda (pelajar dan mahasiswa). Hal lain yang turut menghasilkan ketercapaian target kinerja adalah pembentukan Tim-Tim yang dibuat oleh Badan Kesbangpol, antara lain Tim Pemantauan Situasi Wilayah/Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- 4) Tingkat partisipasi pemilu didapatkan dengan menghitung jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada dibandingkan dengan jumlah masyarakat dalam Daftar Pemilih Tetap. Target tingkat partisipasi pemilu pada Tahun 2024 belum berhasil mencapai target. Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2024 dilaksanakan 5 jenis Pemilu yaitu: Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (putaran 1), Pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan Anggota DPD RI, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (putaran 1). Dengan demikian tingkat partisipasi Pemilu didapatkan dengan meng-agregasi tingkat partisipasi dari kelima jenis Pemilu dimaksud.

D. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 7 (tujuh) tugas urusan pemerintahan umum. Tugas tersebut jika diringkas dapat berbentuk penegakan 4 (empat) konsensus kebangsaan, penegakan demokrasi, kerukunan antar umat beragama, penanganan konflik sosial, dan urusan sisa. Dengan karakteristik tugas tersebut, dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Badan Kesbangpol membangun sinergi antar lembaga pemerintah (hubungan antar unsur pimpinan di daerah) maupun lembaga non pemerintah. Secara rinci *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5 Keterlibatan Aktor dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

No	Lembaga	Aktor/Lembaga		Keterangan
		Pemerintah	Non Pemerintah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BINDA	√		Forkopimda
2.	Polda Metro Jaya	√		Forkopimda
3.	TNI	√		Forkopimda
4.	Kejaksaan Tinggi	√		Forkopimda
5.	Satpol PP	√		
6.	BPIP	√		
7.	KPU Provinsi DKI Jakarta	√		
8.	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	√		
9.	Komisi Informasi Publik	√		
10.	Komisi Pemberantasan Korupsi	√		
11.	Partai Politik		√	
12.	Tokoh Masyarakat		√	
13.	Tokoh Agama		√	
14.	Organisasi Kemasyarakatan/ Sipil		√	
15.	Kemenko Polkam	√		
16.	Kementerian Pertahanan	√		
17.	Kementerian Dalam Negeri	√		
18.	Kementerian Hukum			
19.	Kementerian Agama / Satuan Vertikal Kementerian Agama	√		

	Daerah			
20.	Kementerian Kebudayaan / Satuan Vertikal Kementerian Kebudayaan	√		
21.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan / Satuan Vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√		
22.	BPS Provinsi DKI Jakarta	√		
23.	BNN / Satuan Vertikal BNN	√		
24.	BNPT	√		
25.	Anggota Forkopimda lainnya	√		Forkopimda
26.	Perangkat Daerah lainnya	√		
27.	Instansi / Lembaga / Organisasi / Unsur Lainnya	√	√	

Keterangan:
Forkopimda: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kondisi ideal yang seharusnya terjadi, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Secara umum, identifikasi permasalahan pada pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Umum dalam RPJMD 2025-2029, difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Tren nilai IDI Provinsi DKI Jakarta pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, namun belum secara utuh mencerminkan kondisi dinamika sosial dan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alma’arif (2025) yang mengungkapkan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan abstrak yang sulit untuk diukur. Akibatnya, Badan Kesbangpol sulit menentukan indikator kinerja yang dapat berkontribusi secara langsung pada capaian outcome yang lebih luas. Identifikasi permasalahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD), Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Wilayah, Hasil Reses Anggota DPRD, serta hasil laporan Tim Monitoring Badan Kesbangpol, sebagaimana berikut:

1) Dukungan Sumber Daya Pada Manajemen Organisasi Internal

Berdasarkan hasil penjaringan isu yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dukungan sumber daya manajemen internal merupakan isu yang kerap muncul sebagai isu prioritas dalam evaluasi kinerja tahunan. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di Badan Kesbangpol berdampak pada kurangnya inovasi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan politik di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan kurangnya penerimaan pegawai baru

(CASN) di Badan Kesbangpol mengakibatkan generation gap yang cukup signifikan sementara jumlah pegawai yang memasuki masa purna terus bertambah setiap tahun. Kekosongan posisi atau jabatan ini membuat jumlah pegawai Badan Kesbangpol masih jauh dari ideal. Dengan kata lain, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, proporsi sumber daya manusia di Badan Kesbangpol perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Selain masalah sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik di DKI Jakarta menjadi hal yang menghambat kinerja Badan Kesbangpol. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik dikategorikan dalam urusan Pemerintahan Umum. Hal ini berdampak pada tingkat prioritas alokasi APBD pada masing-masing urusan. Selain itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun atas pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana tusi kesatuan bangsa dan politik tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap upaya pencapaian SPM sehingga sulit bagi Badan Kesbangpol untuk mendapat dukungan anggaran yang ideal.

Selanjutnya, masalah sumber daya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan khususnya di Suku Badan Kesbangpol Kab./Kota Administrasi. Saat ini, kondisi sarana prasarana yang belum memadai dan kondisi aset yang rusak telah menghambat pelayanan internal yang seharusnya dapat dilakukan secara optimal. Dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, Badan Kesbangpol diharapkan dapat menyesuaikan kondisi perkembangan informasi dan pemanfaatan teknologi pada penyediaan sarana dan prasarana untuk hasil kinerja yang lebih baik.

Permasalahan manajemen organisasi internal selanjutnya adalah terkait struktur kelembagaan Badan Kesbangpol. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesbangpol memiliki peran yang signifikan sesuai dengan asas dekonsentrasi. Pasca ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, diperlukan usulan grand design kelembagaan terbaru untuk Badan Kesbangpol dalam rangka mengoptimalkan penugasan urusan pemerintahan umum yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sampai saat ini, Keputusan Presiden tentang pemindahan ibukota belum disahkan. Akibatnya, struktur, tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol belum diatur secara khusus. Badan Kesbangpol menyadari bahwa belum ada payung hukum tertinggi yang dapat mendasari

pembentukan struktur kelembagaan baru. Oleh karenanya, saat ini peraturan yang dapat mendasari struktur kelembagaan Badan Kesbangpol adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Namun demikian, struktur kelembagaan yang ada saat inipun belum sesuai dengan Kepmendagri tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Badan Kesbangpol perlu melakukan kajian yang matang atas dasar hukum, struktur, tugas pokok, fungsi Badan Kesbangpol serta analisa beban kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kesbangpol, saat ini terdapat 701 (tujuh ratus satu) organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar di DKI Jakarta. Banyaknya jumlah ormas di DKI Jakarta secara tidak langsung mencerminkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat pada isu-isu sosial politik di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Badan Kesbangpol, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menempatkan ormas sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan stabilitas sosial dan politik serta menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan hasil FGD Badan Kesbangpol dengan pemangku kepentingan terkait ormas, permasalahan yang terjadi saat ini yaitu belum adanya cluster atau kategorisasi ormas sesuai dengan bidang kerja atau misi organisasi yang diampu, jumlah anggota, dan dampak yang diberikan kepada masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan ormas, kategorisasi tersebut dinilai penting sebagai salah satu dasar bagi Badan Kesbangpol untuk menentukan intervensi dan insentif yang sesuai dengan kinerja ormas. Selain itu, pemberdayaan ormas diharapkan dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan yang meningkatkan kemandirian ekonomi anggota ormas. Hal ini dirasa perlu mengingat banyaknya ormas di DKI Jakarta yang masih melakukan aktivitas meresahkan di tengah masyarakat dengan motif ekonomi seperti pungli parkir, pungli pedagang pasar, pungli keamanan di kawasan pabrik atau tempat makan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait pengawasan ormas, permasalahan legalitas atau keabsahan ormas menjadi tantangan yang perlu dijadikan perhatian khusus bagi Badan Kesbangpol. Pentingnya pencatatan atau pemutakhiran database ormas harus diikuti dengan verifikasi lapangan atas kebenaran dokumen ormas. Dalam hal ini, Badan Kesbangpol dirasa perlu untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pentahelix. Selain pengawasan organisasi masyarakat yang berwarga negara Indonesia, pengawasan organisasi masyarakat asing juga perlu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjalin komunikasi dan kerja sama. Sampai saat ini, belum didapati perhatian khusus yang diberikan kepada pemberdayaan dan

pengawasan organisasi masyarakat asing sehingga Badan Kesbangpol perlu melihat hal ini sebagai potensi kerja sama yang baik di kemudian hari.

3) Tingkat Partisipasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta

Hasil partisipasi masyarakat DKI Jakarta pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara umum dinilai kurang optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta adalah sebanyak 8.252.897 pemilih. Dari jumlah DPT tersebut tingkat partisipasi pemilu di DKI Jakarta dihasilkan angka sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi (%)
Presiden dan Wakil Presiden	79,47%
Dewan Perwakilan Rakyat RI	78,3%
Dewan Perwakilan Daerah RI	78,23%
DPRD Provinsi DKI Jakarta	77,88%
Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur)	57,52%

Dari hasil persentase diatas, didapatkan hasil keseluruhan tingkat partisipasi pemilu Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 74,28% atau 6.130.252 pemilih. Angka ini merupakan rerata yang didapat dari penjumlahan tingkat partisipasi seluruhnya. Dalam hal ini, masih ada total jumlah 2.122.645 pemilih di DKI Jakarta yang belum berpartisipasi secara optimal. Hasil rerata tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan sebagai dasar minimal partisipasi pemilu di DKI Jakarta yaitu sebesar 77,75%. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Kesbangpol pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah:

- a. *vote fatigue* atau kejenuhan masyarakat dalam memilih. Pendeknya jarak penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada yang hanya selisih 8 (delapan) bulan mengakibatkan singkatnya waktu kampanye oleh kontestan pemilu dan sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Hal ini mengakibatkan tingginya arus informasi politik dalam waktu singkat sehingga menimbulkan kebingungan dan kejenuhan di tengah masyarakat;
- b. sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dinilai belum optimal;
- c. pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik belum optimal mengingat Partai Politik fokus pada pemenangan Pemilu Nasional dan Daerah; dan

- d. dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah DKI Jakarta yang belum memuaskan masyarakat sehingga memberikan dampak pada rasa ketidakpercayaan (*trust issue*) untuk memilih Kepala Daerah baru.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesbangpol perlu merumuskan langkah intervensi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat DKI Jakarta pada Pemilu yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini, pada FGD yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol pada tema Bidang Politik dan Demokrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) mencatat bahwa DKI Jakarta akan diwarnai oleh pemilih berusia 17-85 tahun sebanyak (kurang lebih) 8.939.009 pemilih di Tahun 2029. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol perlu menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilu yang akan datang sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024.

4) Bantuan Keuangan Partai Politik

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per suara sah. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat dinamika politik yang jauh lebih besar, belum mendapatkan bantuan keuangan dari APBD secara optimal. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Mengingat dinamika politik masyarakat DKI Jakarta yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan peningkatan besaran nilai Bantuan Keuangan Partai Politik. Usulan kenaikan bantuan Partai Politik didasarkan pada usulan atau rekomendasi pimpinan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD DKI Jakarta, kemampuan keuangan daerah, dan kajian kelayakan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, keuangan Partai Politik dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan untuk Partai Politik diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, besaran nilai bantuan keuangan pada tingkat Provinsi dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan sebelumnya melakukan evaluasi APBD secara selektif sesuai dengan kriteria (kondisi kemampuan keuangan daerah dan nilai persuara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya) dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

5) Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada

Pada bulan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi sorotan publik, khususnya di bidang politik dan tata negara. MK memutuskan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal tidak lagi diselenggarakan secara bersamaan pada tahun 2029, berbeda dengan format Pemilu 2019 dan 2024 yang lalu. Hal tersebut berdasarkan putusan resmi MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional (Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilihan Umum Lokal (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD) pada tahun 2029 tidak lagi dilakukan secara bersamaan. Pemilu Nasional akan berlangsung pada tahun 2029 sedangkan Pemilihan Umum Lokal dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden. Dengan perubahan tersebut, Badan Kesbangpol perlu memerhatikan beberapa dampaknya, antara lain:

- a. agenda pemilihan menjadi lebih kontinu dengan berjarak paling lama 2 tahun. Berkaca pada kecenderungan terdahulu di mana agenda pemilihan berpotensi menyebabkan polarisasi dan ketidak-kondusifan di tengah masyarakat, maka kondisi tersebut berpotensi terjadi dalam waktu yang berkelanjutan;
- b. masyarakat bisa lebih fokus menilai secara utuh calon Presiden-Wakil Presiden dan calon Legislatif Nasional, serta calon kepala daerah dan calon Legislatif Lokal, tanpa terdistraksi oleh euforia masing-masing jenis pemilihan; dan
- c. dampak pembiayaan daerah pada Pemilu dan Pilkada yang terpisah berpotensi menambah biaya logistik dan/atau operasional meski beban kerja penyelenggara bisa jadi lebih ringan dan terfokus.

6) Penanganan Konflik Sosial

Jakarta sebagai kota besar tujuan urbanisasi berdampak pada struktur masyarakat yang heterogen dan multietnis. Keberagaman ini tidak terbatas hanya dari identitas suku, ras, golongan, agama, maupun budaya, tetapi juga keberagaman kondisi sosial ekonomi. Salah satu dampak dari keberagaman tersebut adalah potensi kerentanan terhadap friksi, baik karena perbedaan identitas atau kesenjangan sosial ekonomi sehingga hal ini berujung pada terjadinya konflik sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, definisi konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam konteks kewilayahan di DKI Jakarta, konflik sosial di perkotaan besar memiliki ciri yang khas seperti kekerasan antar kelompok (tawuran) antar pelajar/antar komunitas, sengketa/perebutan wilayah kekuasaan antar kelompok, konflik antar identitas, sampai dengan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah dengan motif politik atau ekonomi. Konflik sosial di DKI Jakarta merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mencatat bahwa setidaknya terdapat 126 kejadian konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Di Tahun 2024, konflik sosial yang terjadi di Jakarta tercatat sebanyak 49 kasus. Angka ini meningkat hampir 50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencatat sebanyak 29 kasus (kenaikan 20 kasus). Secara rinci, kasus konflik sosial di Jakarta, dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri, 2025.

Grafik II.2 di atas menunjukkan adanya kenaikan jumlah konflik sosial di Jakarta sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah konflik sosial pada tahun 2020 hanya berjumlah 4 kejadian disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat masih terbatas. Sementara kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 hingga 2024 yang hampir mencapai 50 kasus. Lebih lanjut, data kejadian konflik sosial yang terjadi di DKI Jakarta pada Bulan Januari s.d. Juli 2025 adalah sebanyak 94 kejadian. Hal ini berdampak secara signifikan pada stabilitas sosial dan keamanan di DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, teknologi juga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan tindak kekerasan antar kelompok. Hal ini mengakibatkan sulitnya masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi waktu dan tempat kejadian konflik.

Dari sisi pelaku, konflik yang berujung kekerasan antar pelajar/kelompok usia muda masih mendominasi jumlah kejadian konflik secara umum di DKI Jakarta. Tingkat kerusakan atau dampak yang ditimbulkan dari aksi tawuran tersebut tergolong kecil. Meski demikian, intensitas kejadian tawuran yang cukup sering terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, yang paling dirugikan adalah masa depan generasi muda dan potensi sumber daya yang hilang karena aksi yang tidak bertanggung jawab. Kompleksitas kekerasan antar pelajar/kelompok ini juga semakin memburuk dengan penyalahgunaan sosial media sebagai media komunikasi yang sulit dilacak oleh aparat.

7) Penyalahgunaan Narkotika

Kota DKI Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia. BNN RI mengkategorikan Kota Jakarta pada zona merah dengan angka prevalensi pengguna narkoba sebesar 1,85% dari total populasi Jakarta atau setara dengan 190.000 orang. Kawasan rawan narkotika di DKI Jakarta tersebar di pemukiman padat penduduk seperti di kawasan Penjaringan, Johar Baru, Tambora, dan Jatinegara. Kawasan-kawasan tersebut memiliki kerawanan yang tinggi terhadap kondisi sosial dan ekonomi sehingga masyarakat di kawasan tersebut mudah terpengaruh oleh pergaulan yang merugikan, utamanya pada generasi muda usia produktif. Hal ini mengakibatkan gangguan kesehatan dan mental, stigma negatif dari masyarakat, meningkatnya tindak kriminal terkait narkotika, hilangnya potensi sumber daya pada generasi muda hingga menambah beban anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan penegakan hukum. Meski demikian, tingginya angka penyalahgunaan narkotika di DKI Jakarta belum mendapat dukungan penuh dari sisi regulasi. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur P4GN sehingga urgensi penanganan

narkotika di DKI Jakarta masih secara parsial dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu saja. Penyusunan Peraturan Daerah terkait P4GN ini mendukung regulasi nasional dan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui regulasi daerah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan P4GN.

8) Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Narasi Indonesia Emas 2045 seiring dengan bonus demografi yang sering digaungkan merupakan momentum yang perlu dipersiapkan dengan optimal. Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil, jumlah generasi muda dengan rentang usia 17 s.d. 35 tahun di DKI Jakarta adalah berjumlah 3.222.331 orang atau setara dengan 29% dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta. Jumlah ini akan terus meningkat dari waktu ke waktu dan menjadi mayoritas dalam proporsi penduduk DKI Jakarta. Selain itu, perkembangan informasi dan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong dinamika kehidupan sosial di tengah generasi muda. Berkaitan dengan hal ini, Badan Kesbangpol perlu menyesuaikan metode sosialisasi dan edukasi terkait pemahaman nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara dengan pendekatan kekinian. Hal ini sejalan dengan masukan yang diterima oleh Badan Kesbangpol dari organisasi pemuda pada FGD isu-isu kepemudaan yaitu pentingnya menjembatani kesenjangan generasi dalam upaya meningkatkan pemahaman generasi muda atas isu-isu yang dianggap tidak lagi populer.

B. Rumusan Isu Strategis

Penyelarasan isu strategis ini dilakukan untuk memastikan kepentingan atau program nasional terlaksana dengan baik pada tingkat daerah (*top-down*), dan mengakomodir kondisi dan karakteristik Jakarta sebagai Kota Megapolitan yang berkebudayaan (*bottom-up*). Oleh sebab itu, pada bagian ini dipaparkan kebijakan pembangunan tingkat nasional, secara bertahap, hingga fokus pada kekhususan Jakarta.

1) Isu Global

a. *Sustainable Development Goals*

SDGs mencakup 17 tujuan global yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Secara khusus, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol berkaitan erat dengan pencapaian tujuan 16 SDGs yaitu *Peace, Justice and Strong Institutions*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi semua bentuk kekerasan, menegakan supremasi

hukum di semua tingkatan, memastikan akses keadilan bagi semua pihak, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Tujuan ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah konflik sosial, meredam potensi disintegrasi, serta memperkuat stabilitas sosial politik di daerah. Kondisi stabilitas daerah (baik politik, ekonomi, maupun sosial) adalah prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi SDGs. Tanpa stabilitas tidak ada kepastian hukum dan politik untuk investasi dan pembangunan ekonomi.

b. Konflik antar Negara

Beberapa konflik antar negara yang terjadi sedikit banyak akan berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Beberapa potensi pengaruh konflik antar negara tersebut dapat berupa munculnya radikalisme dan polarisasi ideologi. Dalam hal ini, narasi konflik Timur Tengah kerap digunakan untuk menguatkan politik identitas di dalam negeri yang berpotensi memecah belah masyarakat berdasarkan aliran keagamaan atau pilihan politik. Dari sisi stabilitas ekonomi, konflik antar negara akan menimbulkan potensi lonjakan harga barang atau komoditas pokok sebagai akibat embargo dan ketersediaan minyak yang langka. Berkaitan dengan hal ini, DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan aktivitas politik di Indonesia, perlu mewaspadaai eskalasi konflik geopolitik antar negara sebagai bentuk kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

2) Isu Nasional

a. Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat berkaitan dengan Asta Cita 1 berkaitan dengan memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dan Asta cita 8 berkaitan dengan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta cita tersebut juga sebagai prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, dalam RPJMN 2025-2029 terdapat program prioritas presiden dan program hasil terbaik cepat (PHTC). Pada Asta Cita tersebut terdapat Program Prioritas 16 yaitu memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah, adalah program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

b. Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga

Urusan Pemerintahan Umum yang saat ini diampu oleh Badan Kesbangpol adalah urusan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kinerja perangkat daerah secara mandatoris. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan kebijakan dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada urusan pemerintahan umum, instruksi menteri tersebut telah menetapkan tujuan, indikator tujuan, program, *outcome*, dan indikator *outcome*.

Tabel II.6 Tujuan dan Indikator Tujuan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM
Indikator	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Demokrasi Indonesia• Indeks Harmoni Indonesia

Program	Outcome	Indikator	Ket.
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	

Ekonomi, Sosial, dan Budaya	masyarakat	dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Selain intruksi menteri, perhatian terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Renstra Ditjen Polpum Kemendagri bertugas dalam mendukung Tujuan 1 Kementerian Dalam Negeri, yaitu Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, Ditjen Polpum Kemendagri menetapkan sasaran yaitu Meningkatkan kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional (Sasaran Strategis 1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi antara lain Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi.

Selanjutnya, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di tingkat daerah, terdapat kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengarusutamakan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam program atau kegiatan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat sepenuhnya selaras dengan kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat utamanya dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oleh karenanya, BPIP membuat Peta Jalan PIP (Pendalaman Ideologi Pancasila) yang bertujuan untuk menderivasi segala hal prinsipil dalam Anggaran/Kebijakan PIP dengan berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diusulkan oleh tiap-tiap lembaga negara, K/L, dan Pemda selama periode lima tahun ke depan.

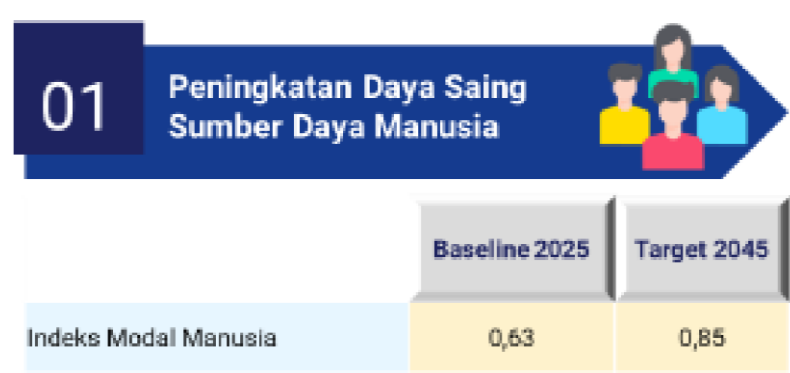
Dengan itu, segala isu strategis, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen Anggaran/Kebijakan PIP tidak saja akan menjadi kongkret, tetapi juga mampu menghadirkan komitmen serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkannya secara bergotong royong.

Lebih lanjut, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol pada urusan pemerintahan umum di daerah, terdapat kebijakan Pemerintah Pusat terkait klasifikasi ancaman non-militer yang perlu dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Pada tingkat Pemerintah Pusat, kebijakan ini diampu oleh Kementerian Pertahanan RI Dalam hal ini, Badan Kesbangpol perlu mempersiapkan hal-hal yang menyangkut antisipasi dan kebijakan terkait ancaman non-militer yang mungkin akan terjadi di wilayah DKI Jakarta.

3) Isu Regional dan Lokal

Berdasarkan Visi Jangka Panjang Jakarta, terdapat 5 visi yang telah ditetapkan yaitu 1) peningkatan daya saing sumber daya manusia; 2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) peningkatan pendapatan per kapita; 4) perwujudan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing; dan 5) penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju Net Zero Emision. Adapun sasaran visi yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan umum, yaitu sasaran visi 1, dengan indikator Indeks Modal Manusia.

Gambar II.2 Sasaran Visi berkaitan Fungsi Pemerintahan Umum



Sumber: RPJPD Jakarta 2025-2045

Sasaran visi 1 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kompetensi, mendorong inovasi dan kreativitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Peningkatan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada akses dan mutu kesehatan dan pendidikan, pembangunan keterampilan, penguasaan teknologi, dan internalisasi nilai dan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam mendukung program prioritas

Gubernur DKI Jakarta, Badan Kesbangpol turut berkontribusi dalam program prioritas pada Penanggulangan Kemiskinan, Disabilitas, dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Selain itu, berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, terdapat kebijakan khusus pada penanganan konflik sosial yang tercantum dalam Tujuan 1 (satu) RPJMD 2025-2029 yaitu “Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan”. Hal ini berkaitan dengan upaya percepatan penanganan konflik sosial khususnya pada tawuran antar pelajar/kelompok-komunitas yang dilakukan melalui kerja sama Pemerintah dan masyarakat dalam program Jaga Jakarta.

Adapun rumusan isu strategis Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7 Isu Strategis Badan Kesbangpol

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Bakesbangpol
			Lokal	Nasional	Global	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kompetensi /merit dan ketersediaan sumber daya (manusia, aset, anggaran) Badan Kesbangpol	Kompetensi sumber daya manusia Badan Kesbangpol	-	v	-	-	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	Tren penurunan jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol sebagai akibat dari pensiun dan pembatasan rekrutmen baru.	-	v	-	-	Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Organisasi Internal
	Alokasi anggaran Badan Kesbangpol yang tidak memadai	-	v	-	-	Penguatan peran Badan Kesbangpol sebagai pendukung program pembangunan daerah
Kerja sama dan pemberdayaan peran ormas dalam pembangunan daerah	Belum adanya pengategorian ormas dan sistem verifikasi/validasi data ormas di lapangan serta belum optimalnya pemberdayaan ormas	-	v	v	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Pengamalan nilai Pancasila dan Demokrasi di DKI Jakarta	Rendahnya tingkat partisipasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta	-	v	-	-	Partisipasi dan pendidikan politik masyarakat DKI Jakarta
	Menurunnya pemahaman dan implementasi nilai Ideologi Pancasila, serta semangat cinta tanah air		v	v	-	Penguatan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Bela Negara, serta penguatan nilai pembauran kebangsaan
	Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi		v	v	-	Fasilitasi dan/atau dukungan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Bakesbangpol
			Lokal	Nasional	Global	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal					pelaksanaan serta operasional Pemilu dan Pilkada
Stabilitas politik melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik	Bantuan keuangan bagi Partai Politik di DKI Jakarta belum optimal	-	v	-	-	Bantuan Keuangan Partai Politik
Kohesivitas masyarakat dan stabilitas sosial di DKI Jakarta	Tingginya intensitas konflik sosial dalam bentuk kekerasan (tawuran) antar kelompok	-	v	v	-	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Penguatan Kolaborasi dengan Tokoh Agama, Masyarakat, Etnis, dan <i>stakeholder</i> strategis lainnya
Peran dan kontribusi generasi muda dalam pembangunan daerah meningkat	DKI Jakarta berada di zona merah penyalahgunaan narkoba	-	v	-	-	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba
	Kesenjangan generasi dalam upaya ‘membumikan’ nilai-nilai Pancasila	-	v	v	-	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik sebagai bagian dari pemenuhan Tujuan 5 SDGs	Belum optimalnya persentase keterwakilan perempuan (kurang dari 30%) di DPRD Provinsi DKI Jakarta	-	v	v	v	Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender
Penciptaan ruang yang aman bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai bagian dari pemenuhan Tujuan 16 SDGs	Angka kematian yang disebabkan oleh konflik sosial	-	v	v	v	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Perwujudan nilai Pembukaan UUD 1945 pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial	Terjadinya konflik antar negara/kawasan yang menimbulkan ketegangan / ketidakstabilan di bidang politik, perdagangan / ekonomi, sosial kemasyarakatan	-	v	v	v	Penciptaan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di DKI Jakarta
Visi Jakarta Kota Global	Peningkatan jumlah orang asing yang beraktivitas di DKI Jakarta tanpa pengawasan dan legalitas yang sesuai	-	v	v	v	Penguatan pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing di DKI Jakarta
	Jakarta menjadi tempat singgah bagi pengungsi asing /	-	v	v	v	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan			Isu Strategis Bakesbangpol
			Lokal	Nasional	Global	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pencari suaka internasional					

Sumber: diolah oleh tim Penyusun, 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Penetapan tujuan memegang peran sentral dalam tahapan perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Badan Kesbangpol). Tahap ini mencerminkan proses perumusan tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan tingkat urgensi dan prioritas tertinggi bagi lembaga dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman strategis, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam merancang arsitektur kinerja. Dengan adanya penetapan ini, setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dapat diarahkan secara lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, sehingga mampu mewujudkan capaian pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan merupakan bentuk konkret dari hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai arah implementatif dari visi pembangunan daerah. Penetapan tujuan ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, perumusan tujuan mempertimbangkan berbagai permasalahan aktual dan isu-isu strategis yang berkembang, sehingga tujuan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta dinamika lingkungan strategis. Dalam penyusunannya, tujuan harus mampu menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan akan tercapai di masa mendatang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan tersebut juga diselaraskan dengan mandat dan arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, agar terjalin konsistensi antara perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan kebijakan makro pembangunan daerah secara keseluruhan, serta mendukung tercapainya visi pembangunan jangka panjang provinsi secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung capaian Tujuan 1 dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi DKI Jakarta yaitu Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan, dengan Sasaran 4 yaitu Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat, maka Badan Kesbangpol merumuskan tujuan Renstra yaitu **Terwujudnya Persatuan, Toleransi, Kerukunan, dan Nilai Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural**, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Toleransi, Kerukunan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat yang Berbhineka,
- 2. Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi Dalam Masyarakat
- 3. Meningkatnya Kualitas Kewaspadaan Masyarakat Jakarta Dalam Menjaga Eksistensi Bangsa di Kancan Masyarakat Megapolitan.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra tersebut, disusun indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol dengan mempertimbangkan evaluasi capaian lima tahun sebelumnya dan menjaga rasionalitas. Adapun rincian indikator dan target, sebagai berikut:

Tabel III.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang belandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM• Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Terwujudnya Persatuan, Toleransi, Kerukunan, dan Nilai Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural		Nilai Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demorasi Indonesia	90,66	91,28	91,82	92,35	92,89	92,96	
		Meningkatnya Toleransi, Kerukunan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat yang Berbhineka	Indeks Harmoni Indonesia	6,72	6,76	6,8	6,84	6,88	6,92	
		Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi Dalam Masyarakat	Nilai empat Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi Indonesia	96,28	96,29	96,3	96,31	96,32	96,33	
		Meningkatnya Kualitas Kewaspadaan Masyarakat Jakarta Dalam Menjaga Eksistensi Bangsa di Kancan Masyarakat Megapolitan	Indeks Kewaspadaan Nasional	68,35	68,45	68,55	68,65	68,75	68,85	

III.2 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan langkah-langkah jangka menengah yang bersifat menyeluruh dan terarah, yang disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif dan efisien. Dalam konteks Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, strategi disusun berdasarkan

isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, terutama berkaitan dengan penguatan modal manusia dan masyarakat madani. Strategi menjadi dasar dalam menetapkan program-program indikatif yang relevan, serta mengarahkan seluruh sumber daya organisasi agar terfokus pada pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam kurun waktu lima tahun, strategi Badan Kesbangpol diarahkan untuk memperkuat nilai budaya, demokrasi, dan kebhinekaan masyarakat megapolitan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun atmosfer kota global. Adapun penahapan Renstra Badan Kesbangpol dirinci pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III.2 Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengembangan Basis Data dan Literasi Kebangsaan dan Politik	Eksplorasi Inovasi, Pengembangan Model Dialog Lintas Komunitas dan Partisipasi Masyarakat	Optimalisasi Pelaksanaan Program secara lebih luas, Masif, dan Terukur; Pemanfaatan Teknologi Digital serta Memperkuat Jejaring Komunitas Multikultural dan Masyarakat Sipil	Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kerukunan, Toleransi dan Partisipasi Masyarakat Multikultural	Terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global yang Multikultural, Toleran, Rukun, serta menjunjung tinggi Nilai-Nilai Demokrasi

III.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan, dalam bentuk panduan operasional yang lebih teknis dan aplikatif. Arah kebijakan menjelaskan bagaimana strategi akan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan sektoral dan program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesbangpol secara bertahap. Dengan merujuk pada strategi utama, arah kebijakan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan berfungsi sebagai instrumen penghubung antara perencanaan strategis dan implementasi teknis yang konkret di lapangan, guna mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah secara terarah dan berkesinambungan.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, maka

diperlukan penetapan arah kebijakan yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan strategi, sebagaimana dirinci berikut ini:

**Tabel III.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan/Strategi RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	<ul style="list-style-type: none">• Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;• Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;• Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya	Penghapusan diskriminasi sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan• Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan/Strategi RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
2.	<ul style="list-style-type: none">• Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa• Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing	Peningkatan kohesivitas masyarakat untuk mencegah konflik sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-
3.	<ul style="list-style-type: none">• Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;• Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan	Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi Pancasila	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan/Strategi RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi			
4.	<ul style="list-style-type: none">• Perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;• Pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya	Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik• Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-

III.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029

Penyusunan pohon kinerja dibuat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi. Pada bagian berikutnya akan dijabarkan matriks untuk mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) dalam penyusunan pohon kinerja Badan Kesbangpol.

A. Level I

Tabel III.4 Merumuskan Tujuan Renstra Badan Kesbangpol berdasarkan Isu Strategis

	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
Mandat (Dasar Hukum): <ul style="list-style-type: none">UU 23/2014 tentang Pemerintahan DaerahUU 7/2017 tentang PemiluUU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik.UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik SosialUU 10/2016 tentang Pilkada Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-UndangUU 16/2017 tentang Organisasi KemasyarakatanUU 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDUU 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045PP Nomor 58 Tahun 2016 adalah tentang Pelaksanaan UU 17/2013 tentang Organisasi KemasyarakatanPP 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 7/2012 Tentang Penanganan Konflik SosialPP 12/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di DaerahPP 1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029Perda DKI Jakarta No. 8/2024 tentang RPJPDPerda DKI Jakarta No.2/2025 tentang RPJMD DKI Jakarta 2025–2029	Isu Global	TERWUJUDNYA PERSATUAN, TOLERANSI, KERUKUNAN, DAN NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL
	Sustainable Development Goals (SDGs)	
	Konflik antar Negara dan Kawasan	
	Jakarta Kota Global	
	Isu Nasional	
	Partisipasi Politik dan Pemilu	
	Pendanaan Parpol	
	Ideoogi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara	
	Deteksi & Penanganan Konflik Sosial	
	Fasilitasi dan/atau dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	
	Isu Regional dan Lokal	
	Sumber Daya Manusia dan Manajemen Organisasi Internal	
	Peran Badan Kesbangpol dalam program pembangunan daerah	
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	
	Partisipasi dan pendidikan politik masyarakat DKI Jakarta	
	Penguatan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Bela Negara, serta penguatan nilai pembauran kebangsaan	

	Bantuan keuangan bagi Partai Politik di DKI Jakarta
	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Penguatan Kolaborasi dengan Tokoh Agama, Masyarakat, Etnis, dan stakeholder strategis lainnya
	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
	Penciptaan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di DKI Jakarta
	Penguatan pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing di DKI Jakarta
Harapan: <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya toleransi, kerukunan, dan partisipasi masyarakat• Meningkatnya kebebasan demokrasi masyarakat• Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik dan ancaman	

B. Level II

Tabel III.5 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
TERWUJUDNYA PERSATUAN, TOLERANSI, KERUKUNAN, DAN NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MULTI-KULTURAL	Terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, saling menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi	Penguatan program ideologi wawasan kebangsaan dan demokrasi melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye publik	Meningkatnya Toleransi, Kerukunan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat yang Berbhineka
	Terbentuknya kehidupan masyarakat Jakarta yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan serta demokrasi dalam keberagaman	Penguatan dialog antarkelompok masyarakat dan pendidikan multikultural	
	Ormas terdaftar dan terawasi secara aktif serta turut terlibat dalam pembangunan	Peningkatan pemahaman dan pembinaan terhadap Ormas serta pembentukan satuan tugas terpadu pengawasan ormas dan sistem pelaporan secara digital.	

Meningkatnya daya saing masyarakat Jakarta dalam menghadapi tantangan global (arus migrasi, disinformasi digital, isu intoleransi, serta tekanan politik identitas)	Penguatan literasi digital, diplomasi budaya, dan peran generasi muda sebagai duta toleransi dan demokrasi di tingkat lokal maupun global	
Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab	Peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi	Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi dalam Masyarakat
Terciptanya masyarakat yang memahami, menghargai, dan melaksanakan prinsip demokrasi secara sehat	Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam mendorong kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab	
Tingkat partisipasi generasi muda dalam Pemilu meningkat signifikan	Pendidikan politik berbasis digital dan komunitas di kalangan generasi muda	
Bantuan keuangan Parpol meningkat dan berdampak pada penguatan demokrasi	Penyusunan kebijakan bantuan Parpol berbasis analisis dampak dan kebutuhan.	
Meningkatnya peran dan fungsi lembaga Bakesbangpol dalam mendukung penerapan nilai-nilai demokrasi di masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan Bakesbangpol serta literasi kebangsaan	
Terwujudnya masyarakat Jakarta yang memiliki daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik skala lokal maupun global	Peningkatan kapasitas kewaspadaan dini masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga strategis	Meningkatnya Kualitas Kewaspadaan Masyarakat Jakarta dalam Menjaga Eksistensi Bangsa di Kancah Masyarakat Megapolitan
Potensi konflik sosial dapat dideteksi dan ditangani secara dini dan terkoordinasi.	Pengembangan sistem deteksi berbasis data spasial dan media sosial.	
Terciptanya Jakarta sebagai kota yang aman, harmonis, dan multikultural.	Optimalisasi peran media sosial dan platform digital untuk menyebarkan narasi positif dan menangkal hoaks.	
Sistem monitoring berbasis AI dapat mengidentifikasi potensi konflik sebelum eskalasi.	Penerapan teknologi deteksi visual dan integrasi dengan pemantauan kewilayahan.	

C. Level III

Tabel III.6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah lain
Meningkatnya Toleransi, Kerukunan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat yang Berbhineka	Terbangunnya budaya dialog, gotong royong, dan toleransi antarwarga di tengah keragaman budaya, agama, serta etnis di Jakarta sebagai kota global	Penguatan literasi kebangsaan, dialog multikultural, serta pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dan digital	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
	Masyarakat Jakarta memiliki pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kuat, sehingga toleransi kerukunan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbhineka meningkat signifikan.	Sosialisasi dan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, dialog antarkelompok, dan kegiatan kebudayaan yang inklusif.		
	Organisasi kemasyarakatan tumbuh sehat, mandiri, dan berperan aktif dalam mendorong kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab, dengan pengawasan yang efektif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan, serta pengawasan partisipatif berbasis komunitas.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Masyarakat Jakarta memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat, sehingga kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa terjaga.	Pembinaan ketahanan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan sosial budaya, dan building resilience terhadap guncangan.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
	Terwujudnya masyarakat Jakarta yang berdaya saing, serta bebas dari ancaman narkoba sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial-budaya di kota global	Penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye publik, pendidikan karakter generasi muda, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan sosial		
	Terbangunnya harmoni sosial	Peningkatan peran lembaga		

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah lain
	dan kerukunan umat beragama yang kokoh di seluruh wilayah DKI Jakarta	kerukunan beragama; Dialog dan komunikasi antar agama; Sosialisasi dan Pendidikan moderasi agama		
Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi dalam Masyarakat	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas dan sistem yang mendukung kebebasan demokrasi, dengan pelayanan publik yang adil dan partisipatif.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	Program strategis berjalan efektif yang mampu meningkatkan nilai kebebasan demokrasi dalam masyarakat.	Perencanaan berbasis kinerja dan evaluasi anggaran yang berkelanjutan.		
	Masyarakat Jakarta mampu menggunakan hak demokrasi secara sehat, inklusif, dan bebas dari ujaran kebencian serta hoaks digital	Penguatan partisipasi politik warga, fasilitasi ruang demokrasi publik, dan peningkatan literasi digital-politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
	Partai politik dan lembaga pendidikan berperan aktif dalam membangun kewaspadaan nasional melalui pendidikan politik dan etika politik yang sehat.	Pendidikan politik yang inklusif dan penguatan etika politik bagi elite dan masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bangsa.		
Meningkatnya Kualitas Kewaspadaan Masyarakat Jakarta dalam Menjaga Eksistensi Bangsa di Kancan Masyarakat Megapolitan	Masyarakat Jakarta adaptif dan mampu beradaptasi menghadapi ancaman global: radikalisme, polarisasi politik, konflik sosial, bencana, dan disinformasi	Penguatan sistem kewaspadaan dini masyarakat melalui sinergi pemerintah daerah– masyarakat– instansi/lembaga vertikal, serta peningkatan kapasitas penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
	Terbangunnya sistem kewaspadaan nasional yang efektif dan	Peningkatan kewaspadaan melalui sistem peringatan dini berbasis		

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah lain
	mekanisme penanganan konflik sosial yang cepat dan damai, sehingga masyarakat merasa aman.	teknologi, dan fasilitasi resolusi konflik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Untuk mengarahkan pelaksanaan strategi dan kebijakan jangka menengah, diperlukan penjabaran dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dijalankan secara tahunan. Penyusunan program mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Program merupakan perwujudan kebijakan dari Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam serangkaian upaya atau kegiatan, dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Seluruh pelaksanaan program tersebut mengarah pada satu tujuan utama, yaitu memperkuat peran Badan Kesbangpol dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun program yang digunakan pada Renstra Badan Kesbangpol tahun 2025-2029 adalah sebanyak 6 (enam) program yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 secara rinci dijelaskan pada Tabel IV.1 sedangkan rencana target kinerja dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat dalam Tabel IV.2 di bawah ini:

Tabel IV.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	TERWUJUDNYA PERSATUAN, TOLERANSI, KERUKUNAN, DAN NILAI DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL				NILAI ASPEK KEBEBASAN DALAM INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
		1. MENINGKATNYA TOLERANSI, KERUKUNAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN PERSATUAN MASYARAKAT YANG BERBHINEKA			INDEKS HARMONI INDONESIA		
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait peran Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan		Indeks Kinerja Ormas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Penguatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		2. MENINGKATNYA NILAI KEBEBASAN DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT			NILAI EMPAT INDIKATOR PADA ASPEK KEBEBASAN DALAM INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
			Meningkatnya kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD/UKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, serta Peningkatan Peran Partai Politik		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		3. MENINGKATNYA KUALITAS KEWASPADAAN MASYARAKAT JAKARTA DALAM MENJAGA EKSISTENSI BANGSA DI KANCAH MASYARAKAT MEGAPOLITAN			INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL		
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik Sosial, dan Pemantauan Orang Asing		Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
					Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				274.058.125.138		292.070.613.527		804.254.101.916		1.063.039.590.306		316.225.078.694	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	87,5	39.165.891.188	88,33	51.646.935.747	89,16	54.096.980.307	90	56.548.024.866	90,83	58.998.069.426	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	80	39.165.891.188	81	51.646.935.747	82	54.096.980.307	83	56.548.024.866	84	58.998.069.426	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	96	96	5.790.690.000	96	6.080.224.500	96	6.369.759.000	96	6.659.293.500	96	6.948.828.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	6	937.860.000	7	984.753.000	7	1.031.646.000	7	1.078.539.000	7	1.125.432.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3466	5000	18.549.063.234	5000	19.145.766.396	5000	20.071.469.557	5000	20.998.172.719	5000	21.923.875.881	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2623	1100	91.000.000	1100	95.550.000	1100	100.100.000	1100	104.650.000	1100	109.200.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0	1	490.000.000	1	490.000.000	1	490.000.000	1	490.000.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	294	294	407.409.705	294	427.780.190	294	448.150.676	294	468.521.161	294	488.891.646	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	0	0	7	5.145.000.000	7	5.390.000.000	7	5.635.000.000	7	5.880.000.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	50	50	1.138.447.621	50	1.195.370.002	50	1.252.292.383	50	1.309.214.764	50	1.366.137.145	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	7	1.543.500.000	7	1.617.000.000	7	1.690.500.000	7	1.764.000.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	7	3.675.000.000	7	3.850.000.000	7	4.025.000.000	7	4.200.000.000	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	294	294	12.251.420.628	294	12.863.991.659	294	13.476.562.691	294	14.089.133.722	294	14.701.704.754	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	0	67	5.893.408.471	68	6.034.078.895	69	6.174.749.318	70	6.315.419.742	71	6.456.090.165	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Penguatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	80	5.893.408.471	81	6.034.078.895	82	6.174.749.318	83	6.315.419.742	84	6.456.090.165	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	1	1.260.000.000	1	1.273.000.000	1	1.286.000.000	1	1.299.000.000	1	1.312.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	1	66.990.000	1	492.376.500	1	515.823.000	1	539.269.500	1	562.716.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2166	1700	3.341.618.471	1700	2.882.662.395	1700	2.825.646.318	1700	2.768.630.242	1700	2.711.614.165	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3435	2300	524.800.000	2300	651.040.000	2300	777.280.000	2300	903.520.000	2300	1.029.760.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	84	700.000.000	84	735.000.000	84	770.000.000	84	805.000.000	84	840.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	0	87,5	34.253.450.700	88,33	34.841.891.697	89,16	35.430.332.696	90	36.018.773.693	90,83	36.607.214.692	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	0	80	34.253.450.700	81	34.841.891.697	82	35.430.332.696	83	36.018.773.693	84	36.607.214.692	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	1	12.000.000.000	1	12.000.000.000	1	12.000.000.000	1	12.000.000.000	1	12.000.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	3	532.630.744	3	532.630.744	3	532.630.744	3	532.630.744	3	532.630.744	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4146	4400	11.710.710.888	4400	12.296.246.432	4400	12.881.781.977	4400	13.467.317.521	4400	14.052.853.066	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	600	9.548.109.068	600	9.551.014.521	600	9.553.919.975	600	9.556.825.428	600	9.559.730.882	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika.	0	0	462.000.000	12	462.000.000	12	462.000.000	12	462.000.000	12	462.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	76.821.204.428	4	80.629.425.319	4	83.639.646.209	4	86.250.867.101	4	90.262.087.990	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	SEKRETARIAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	9	400.000.000	9	400.000.000	9	400.000.000	9	400.000.000	10	400.000.000	SEKRETARIAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	SEKRETARIAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	4	66.394.988.718	4	69.712.488.154	4	73.029.987.590	4	76.347.487.026	4	79.664.986.462	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	110	66.349.988.718	110	69.667.488.154	110	72.984.987.590	110	76.302.487.026	110	79.619.986.462	SEKRETARIAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28	28	45.000.000	28	45.000.000	28	45.000.000	28	45.000.000	28	45.000.000	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	SEKRETARIAT

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	4	2.884.596.630	4	3.028.826.462	4	3.173.056.292	4	3.317.286.125	4	3.461.515.955	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	538.512.893	7	565.438.538	7	592.364.182	7	619.289.827	7	646.215.472	SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	303.530.764	8	318.707.302	8	333.883.840	8	349.060.379	8	364.236.917	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	61.110.892	7	64.166.437	7	67.221.981	7	70.277.526	7	73.333.070	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	6	262.000.757	6	275.100.795	6	288.200.833	6	301.300.871	6	314.400.908	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	28	374.351.000	28	393.068.550	28	411.786.100	28	430.503.650	28	449.221.200	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	412.986.522	4	433.635.848	4	454.285.174	4	474.934.500	4	495.583.826	SEKRETARIAT
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	84	932.103.802	84	978.708.992	84	1.025.314.182	84	1.071.919.372	84	1.118.524.562	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	4	966.880.633	4	829.048.716	4	1.036.590.167	4	888.958.117	4	1.103.478.098	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	
(1)	(2)	(3)											(14)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	167.786.618	1	0	1	177.586.750	1	0	1	184.565.280	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	15	599.094.015	15	629.048.716	15	659.003.417	15	688.958.117	15	718.912.818	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	1.530.517.637	4	1.607.043.518	4	1.683.569.400	4	1.760.095.283	4	1.836.621.165	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	149.817.924	12	157.308.820	12	164.799.716	12	172.290.613	12	179.781.509	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	28	430.424.764	28	451.946.002	28	473.467.240	28	494.988.479	28	516.509.717	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	950.274.949	12	997.788.696	12	1.045.302.444	12	1.092.816.191	12	1.140.329.939	SEKRETARIAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	3.677.905.438	4	3.622.387.328	4	2.873.495.850	4	2.080.777.872	4	2.325.907.863	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	216.327.951	17	227.144.349	17	237.960.746	17	248.777.144	17	259.593.541	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	168	177.577.487	168	186.456.361	168	195.335.236	168	204.214.110	168	213.092.984	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	3.284.000.000	1	3.208.786.618	1	2.440.199.868	1	1.627.786.618	1	1.853.221.338	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	0	4	366.315.372	4	379.631.141	4	392.946.910	4	406.262.678	4	419.578.447	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	12	366.315.372	12	379.631.141	12	392.946.910	12	406.262.678	12	419.578.447	SEKRETARIAT SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Indeks Demokrasi Indonesia	100	100	93.491.006.110	100	93.574.509.416	100	598.558.012.721	100	850.641.516.027	100	95.726.019.332	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	0	80	93.491.006.110	81	93.574.509.416	82	598.558.012.721	83	850.641.516.027	84	95.726.019.332	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	1	1	87.025.440.000	1	87.025.440.000	1	587.025.440.000	1	837.025.440.000	1	87.025.440.000	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun												
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	1	133.980.000	1	140.679.000	1	147.378.000	1	154.077.000	1	160.776.000	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3170	3200	6.013.086.110	3200	6.089.890.416	5000	10.566.694.721	4000	7.143.499.027	3200	6.221.303.332	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	573	400	318.500.000	400	318.500.000	400	318.500.000	400	318.500.000	400	318.500.000	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	14	0	0	0	0	7	500.000.000	14	6.000.000.000	7	2.000.000.000	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	0	87,5	24.433.164.241	88,33	25.343.772.453	89,16	26.354.380.665	90	27.264.988.877	90,83	28.175.597.089	BIDANG KEWASPADAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	0	80	23.625.164.241	81	24.535.772.453	82	25.546.380.665	83	26.456.988.877	84	27.367.597.089	BIDANG KEWASPADAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	BIDANG KEWASPADAAN
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0	4	776.116.801	4	829.522.641	4	982.928.481	4	1.036.334.321	4	1.089.740.161	BIDANG KEWASPADAAN

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun												SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4244	5000	11.871.447.440	5000	12.465.019.812	5000	13.058.592.184	5000	13.652.164.556	5000	14.245.736.928	BIDANG KEWASPADAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1270	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	BIDANG KEWASPADAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	414	436	5.272.600.000	436	5.536.230.000	436	5.799.860.000	436	6.063.490.000	436	6.327.120.000	BIDANG KEWASPADAAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4	3	555.000.000	3	555.000.000	3	555.000.000	3	555.000.000	3	555.000.000	BIDANG KEWASPADAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	0	80	808.000.000	81	808.000.000	82	808.000.000	83	808.000.000	84	808.000.000	SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	13	808.000.000	13	808.000.000	13	808.000.000	13	808.000.000	13	808.000.000	SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IV.2. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program-program Badan Kesbangpol tidak secara langsung mendukung program prioritas kepala daerah, seperti *Quick Wins*, 10 Program Kerja, *DKI Strategic Project* (DSP), maupun *Global City Program* (GCP). Namun, program-program di Badan Kesbangpol mendukung secara langsung pada peningkatan Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta yang mana termasuk pada indikator RPJMD pada Sasaran Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat Yang Berbhineka, Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya Sejahtera di Tujuan 1 Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan.

IV.3. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Kesbangpol menetapkan rangkaian program prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungs Badan Kesbangpol. Adapun penyusunan program prioritas Badan Kesbangpol disajikan sebagai berikut :

Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 7. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 8. Pelaksanaan tugas Paskibraka 9. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 10. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 11. Pembentukan Paskibraka	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait peran Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: 1. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya: 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, serta Peningkatan Peran Partai Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik: 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
			<div>3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div> <div>4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div> <div>5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div>	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik Sosial, dan Pemantauan Orang Asing	<div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (berlaku pada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota):</div> <div>1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</div> <div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (berlaku pada Kabupaten/Kota):</div> <div>1. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</div>	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<div>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div>	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
		SKPD/UKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<div>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</div> <div>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</div> <div>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</div> <div>1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</div> <div>Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>4. Penyediaan Bahan/Material</div> <div>5. Fasilitas Kunjungan Tamu</div> <div>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</div> <div>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>1. Pengadaan Mebel</div> <div>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div> <div>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</div> <div>1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</div>	

IV.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD). Selain itu, ditetapkan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengukur keberhasilan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun IKU dan IKK pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1 RPJMD: Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera									
Sasaran 1.d. RPJMD: Memperkuat Nilai Budaya, Demokrasi, dan Keberagaman Masyarakat									
1.	Nilai Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	90,66	91,28	91,82	92,35	92,89	92,96	
2.	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	6,72	6,76	6,8	6,84	6,88	6,92	
3.	Nilai Empat Indikator Pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	96,28	96,29	96,3	96,31	96,32	96,33	
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	68,35	68,45	68,55	68,65	68,75	68,85	

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1 Renstra: Terwujudnya Persatuan, Toleransi, Kerukunan, dan Nilai Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural									
Sasaran 1 Renstra: Meningkatnya Toleransi, Kerukunan, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Persatuan Masyarakat Yang Berbhineka									
1.	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	86,66	87,5	88,33	89,16	90	90,83	
2.	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	66	67	68	69	70	71	
3.	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Persen	86,66	87,5	88,33	89,16	90	90,83	
Sasaran 2 Renstra: Meningkatnya Nilai Kebebasan Demokrasi dalam Masyarakat									
1.	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	
2.	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	100	100	100	100	100	100	
Sasaran 3 Renstra: Meningkatnya Kualitas Kewaspadaan Masyarakat Jakarta dalam Menjaga Eksistensi Bangsa di Kancah Masyarakat Megapolitan									
1.	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	86,66	87,5	88,33	89,16	90	90,83	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Badan Kesbangpol) merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berlaku selama 5 tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran Badan Kesbangpol dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, baik melalui sumber daya internal maupun optimalisasi kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rencana kinerja, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Kesbangpol. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Perumusan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 diharapkan juga dapat menjadi pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesbangpol sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Terhadap Renstra Badan Kesbangpol akan dilakukan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.